



**DJKN**

# LAPORAN KINERJA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG BANDA ACEH**

**2022**

**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

## PENGANTAR

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan semangat dedikasi, kami menyusun laporan kinerja ini sebagai refleksi dari komitmen kami untuk terus melayani lebih baik. Sesuai dengan semangat yang diusung dalam tahun 2023, fokus utama kami adalah memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan dari pemangku kepentingan. Melalui inovasi, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan, kami berupaya meningkatkan setiap aspek pelayanan yang diberikan.

Sejalan dengan membangun fondasi yang kokoh untuk melayani lebih baik, KPKNL Banda Aceh kembali mencatat dan menyelesaikan seluruh capaian dengan baik. Tentunya, semua ini tidak terlepas dari seluruh insan KPKNL Banda Aceh dari Kepala Kantor sampai pelaksana dengan semangat dan dedikasi yang lebih membara dari tahun sebelumnya untuk bekerja keras menyelesaikan Kontrak Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Hasil dari komitmen kami, akan dilaporkan dan disusun pada Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 ini. Laporan ini bukan hanya sekedar rangkaian angka dan statistik, tetapi juga cerminan dari upaya kolektif untuk menciptakan pelayanan terbaik.

Terucap puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPKNL Banda Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Banda Aceh selama tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai instansi pemerintah perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dilakukan berdasarkan realisasi IKU Kemenkeu-Wide Tahun 2023 yang di-cascade secara langsung maupun tidak langsung dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Banda Aceh. Rata-rata capaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 113,27 % dari 9 Sasaran Strategis (SS) dengan total 19 IKU. Secara keseluruhan IKU yang dicapai pada tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan.

Harapannya, LAKIN KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Banda Aceh serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Februari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Istina Setya Lestari

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). KPKNL Banda Aceh sebagai ujung tombak pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadikan laporan kinerja sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2023 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2023 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024, di mana terdapat 4 tujuan pokok dalam kerangka pembangunan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 yakni Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif; Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; serta Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Banda Aceh menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Sepanjang tahun 2023, KPKNL Banda Aceh telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut:

- a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 101,22% dengan realisasi 68,83% dari target 68%;
- b) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 116,56% dengan realisasi 116,56% dari target 100%;
- c) Tingkat Penurunan outstanding piutang negara sebesar 121,26% atau pencapaian 121,26% dari target 100%;
- d) Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) mencapai 98,43% dengan pencapaian nilai 98,43% dari target 100%;

- e) Indeks Integritas sebesar 100,56% atau pencapaian 89,17 dari target sebesar 88,67;
- f) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 122% dari target 100%;
- g) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar 120 % dari target 100%;
- h) Deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 120% dari target 19% tercapai 0,13%;
- i) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien tercapai 92,27% dari target 70% atau sebesar 131,81%
- j) Persentase penyelesaian BKPN sebesar 103,33% dari target 100%;
- k) Persentase produktivitas lelang sebesar 120% dari target 80%;
- l) Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang tercapai 111,11% atau 100% dari target 90%;
- m) Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN tercapai 120% dengan realisasi 0,05% dari target 15%;
- n) Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah tercapai 100% dari target 90%
- o) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset sebesar 88,07% dari target 86% atau capaian 102,41%;
- p) Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi 120% dari target 100%;
- q) Indeks Pengawasan Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dari target 70 tercapai 96 sehingga mendapat nilai 138%;
- r) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari target 100% terealisasi 117,36%;
- s) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan sebesar 120% dari target 100%.

Secara umum, seluruh capaian pencapaian IKU pada tahun 2023 memenuhi target bahkan pada beberapa IKU melebihi target, kecuali pada IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) yang hampir mencapai nilai maksimal dengan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,27% dari nilai maksimal 120%.

KPKNL Banda Aceh sebagai kantor yang sedang terus bergerak maju, tidak terlena dengan hasil pencapaian yang telah diraih, malah membuat seluruh pegawai semakin antusias dan bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata yang optimal, inovasi yang aplikatif, dan ide-ide terbaik di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi.....	8
C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh.....	15
D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh.....	15
E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan).....	16
F. Sistematika Laporan.....	18
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 dan Perbandingannya.....	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....	33
3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target.....	40
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan.....	42
6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi.....	43
7. Rencana Aksi.....	43
B. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
LAMPIRAN.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan.....	14
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan.....	14
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan.....	14
Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional.....	14
Tabel 2. 1 Kontrak Kinerja Nomor 8.1/KN.13/2023.....	20
Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023.....	26
Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022.....	30
Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024.....	32
Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2023.....	45
Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2023.....	45
Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2023.....	46
Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.....	46
Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.....	46
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh.....	19
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2023, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Banda Aceh dari bulan Januari hingga Desember tahun 2023.

### **B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Banda Aceh terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), dan 5 eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum), serta kelompok jabatan fungsional. Ketentuan tersebut merupakan

hal yang baru dikarenakan berdasarkan Perpres 57/2020 terdapat perubahan atas 6 (enam) fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu “Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang”, menjadi 3 (tiga) fungsi utama yaitu “Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang”. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN juga bertekad untuk mentransformasi diri guna mengantisipasi arah strategis Kementerian Keuangan maupun arah strategis pemerintah Indonesia secara global.

## Visi

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Banda Aceh, seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta *Roadmap DJKN to distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, VISI DJKN yaitu:

**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standadisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif, penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara yang berperan penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi”.
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum.
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya

### **Misi**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimal) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui MISI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **Tujuan**

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. KPKNL yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang juga memiliki tujuan KPKNL Banda Aceh memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan

sebelumnya. Tujuan KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata Kelola dana nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jualan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **Sasaran**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Sasaran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan DJKN yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif

Beranjak dari Sasaran DJKN tersebut sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Banda Aceh dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a. Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
  - b. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;

- c. Terwujudnya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- B. Seksi Piutang Negara
  - a. Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
  - b. Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan;
  - c. Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.
- C. Seksi Hukum dan Informasi
  - a. Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang;
  - b. Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif.
- D. Seksi Kepatuhan Internal
  - a. Pelaksanaan SOP Unggulan tepat waktu;
  - b. Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
  - c. Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
  - d. Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
  - e. Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
  - f. Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat.
- E. Subbagian Umum
  - a. Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
  - b. Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
  - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang
  - a. Terselenggaranya pelayanan lelang yang modern, bersih, transparan dan akuntabel;
  - b. Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang;
  - c. Tercapainya lelang yang produktif.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
  - a. Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib dan berkualitas;
  - b. SDM Penilai yang handal;
  - c. Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;

- d. Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- e. Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Banda Aceh menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa perimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

### Komposisi Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan pada akhir tahun 2023, KPKNL Banda Aceh memiliki 29 Pegawai PNS serta didukung oleh 10 Pegawai Non PNS (honorar). Adapun komposisi pegawai PNS pada KPKNL Banda Aceh dapat dipetakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan kelompok fungsional.

**Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	A	B	C	D	
II	1	0	5	6	12
III	5	5	1	5	16
IV	0	1	0	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA / D1	0	1	1	0	2
D3	0	11	0	0	11
D4/S1	0	0	12	0	12
S2	0	0	3	1	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

USIA	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	11	3	0	14
31-40	0	0	4	0	4
41-50	0	0	6	1	7
Di atas 50	0	1	3	0	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	5	11	1	17
Perempuan	0	7	5	0	12
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

UNIT KERJA	Juru Sita	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Penilai	Jumlah
Seksi Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0
Seksi Kepatuhan Internal	0	0	0	0	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	1	1
Seksi Piutang Negara	1	0	1	0	2
Subbagian Umum	1	0	1	0	2
Kelompok Jabatan Fungsional	0	3	0	3	6
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

### **C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh**

KPKNL Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 13 kota dan/atau kabupaten, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kota Banda Aceh;
- b. Kota Sabang;
- c. Kab. Aceh Besar;
- d. Kab. Aceh Jaya;
- e. Kab. Pidie;
- f. Kab. Pidie Jaya;
- g. Kab. Aceh Barat;
- h. Kab. Nagan Raya;
- i. Kab. Aceh Barat Daya;
- j. Kab. Aceh Selatan;
- k. Kota Subulussalam;
- l. Kab. Aceh Singkil;
- m. Kab. Simeulue.

### **D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh**

KPKNL Banda Aceh sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara;
- f. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- g. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

#### **E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan)**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir DJKN sebagai manajer aset mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern pengelola kekayaan negara yang semakin berorientasi pada pelanggan dengan percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi informasi yang terus disempurnakan. Sejalan dengan “Cetak Biro Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025”, hal ini menandai komitmen DJKN dalam meningkatkan pengelolaan yang lebih baik seiring tuntutan kekinian dalam era transformasi digital (digitalisasi). Digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dalam setiap tahapan manajemen aset dan investasi melalui pembangunan sistem yang andal dan terintegrasi. Pelanggan akan lebih mudah mengajukan permohonan pengelolaan aset dan investasi kepada DJKN sehingga pelayanan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

- a. Sebagai organisasi pembelajar, DJKN terus berupaya mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sehingga meningkat ke tahapan tingkat lanjut dari manajemen aset (*asset management maturity*). Untuk mewujudkan hal ini secara lebih sistematis dan terukur, mendesain *roadmap* menjadi suatu konsekuensi logis sebagai arahan mencapai cita-cita kondisi paripurna yang diharapkan (*end state*). Berangkat dari penelitian dan pemikiran atas seluruh keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi saat ini, DJKN mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara tugas dan fungsi ideal dan implementasi riil yang saat ini dilakukan (*current state*). Kondisi paripurna manajer aset yang ingin dicapai terbagi kedalam 3 (tiga) hal yaitu: Kekayaan negara dikelola optimal dan berkelanjutan. Instrumental dalam Keuangan Negara. dan Kontributif dalam perekonomian nasional.
- b. Tahun 2023 banyak prestasi hebat yang diukir oleh KPKNL Banda Aceh, mendapatkan Nilai IKPA Sempurna (Nilai 100) pada Triwulan I, II, III, dan IV.

- c. Sumber daya manusia yang unggul dan aktif sehingga salah satu pegawai mendapat beasiswa *Non-Degree Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN at the UBD-FPT Global Centre* di Da Nang, Viet Nam Tahun 2023 dari Pemerintah Brunei Darussalam.
- d. KPKNL Banda Aceh juga masih turut serta menjadi salah satu peserta Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- e. Pencapaian yang luar biasa dari KPKNL Banda Aceh adalah capaian penerimaan dari Piutang Negara yang mencapai 1.184,52% yakni dari target Rp8.500.000,00 tercapai sebesar Rp100.684.011,00 juga capaian PNBPN yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang dari target sebanyak Rp1.550.000,00 tercapai hingga Rp1.959.498.608,00. Capaian tahun ini juga digenapkan dengan berhasilnya capaian sertifikasi yang memiliki total realisasi sebanyak 3.245 atau sebesar 121,58% dari target 2.669.
- f. Meningkatnya frekuensi lelang berdampak positif dengan peningkatan PNBPN akan tetapi berbanding lurus juga dengan peningkatan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik yang non TGR ataupun TGR. Perlu adanya regulasi yang lebih tinggi selain PMK atas aturan Lelang.
- g. Tantangan dalam pengurusan piutang negara seringkali Debitor tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitor tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN).
- h. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan penilaian juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah.
- i. Selanjutnya, terdapat IKU yang meskipun tercapai namun memiliki tantangan tersendiri untuk menggapai keberhasilan seperti IKU PNBPN atas kekayaan negara menjadi menantang salah satunya dikarenakan perubahan status Universitas Syiah Kuala menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) pada Tahun 2023 berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala yang berpengaruh pada kewenangan pengelolaan BMN yang sebelumnya berada pada Pengelola Barang menjadi dikelola sendiri.
- j. Dalam hal mencapai capaian SBSK juga memiliki tantangan yang cukup berat, salah satunya karena kurangnya optimalisasi penggunaan aset pada satuan kerja yang menjadi target SBSK pada tahun 2023. Beberapa gambaran kondisi di lapangan antara lain, terdapat aset yang tidak dihuni, terdapat aset yang rusak berat namun tidak dihapuskan, aset idle namun tidak dimanfaatkan, dan lain lain.

## F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2023 ini terdiri atas:

### Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Banda Aceh, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPKNL Banda Aceh.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2023.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
  - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
  - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pencapaian kinerja;
8. Rencana Aksi ke depan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran

Perjanjian Kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis KPKNL Banda Aceh merupakan wujud amanat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2015 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to A Distinguished Asset Manager*). Berdasarkan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 yang telah dirumuskan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Banda Aceh. Pada perjanjian kinerja tahun 2023, KPKNL Banda Aceh telah menetapkan peta strategi di tahun 2023 sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh**



Perjanjian / kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Banda Aceh memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor PK-1A/WKN.01/2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Nomor PK-1A/WKN.01/2023**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		3b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%

		5b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%
6.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	6a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (minimize)	15%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N Indeks Pengawasan Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2023 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017), sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2023.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 dan Perbandingannya

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	Max /
Realisasi	12,112%	44,809%	44,809%	76,829%	116,555%	116,555%	TLK

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max /
Realisasi	43,06%	53,37%	53,37%	95,65%	122,00%	122,00%	TLK

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
	1b-CP Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target					88,67	88,67	Max /
Realisasi					89,17	89,17	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	100%	100%	Max /
Realisasi	8,61%	31,34%	31,34%	56,53%	98,43%	98,43%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	Max /
Realisasi	10,18%	78,71%	78,714%	98,93%	121,26%	121,26%	TLK

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target		50%	50%	55%	68%	68%	Max /
Realisasi	-	88,74%	82,78%	68,83%	68,83%	88,74%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	3b-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	-	20%	20%	60%	100%	100%	Max /
Realisasi	-	36,76%	37,77%	74,93%	121,54%	121,54%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	3c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Max /
Realisasi	13,33%	50,00%	50,00%	83,33%	103,33%	103,33%	TLK

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	4a-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min /
Realisasi	0,09%	0,12%	0,12%	0,10%	<b>0.13%</b>	<b>0.13%</b>	TLK

**Note : realisasi 2023 0,13 % dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)**

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min /
Realisasi	0,09%	0,12%	0,12%	0,10%	<b>0.13%</b>	<b>0.13%</b>	TLK

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5a-CP Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max /
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	Max /
Realisasi	<b>20,00%</b>	<b>32,43%</b>	<b>25,48%</b>	<b>106,19%</b>	<b>131,67%</b>	<b>131,67%</b>	TLK

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	6a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	85%	85%	Max /
Realisasi	-	55,14%	55,14%	-	88,07%	88,07%	TLK

K-Three	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif						
	7a-CP Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	30	45	45	70	90	90	Max /
Realisasi	45%	67,50%	0,675	91,25	100	100	AVG

K-Three	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif						
	7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max /
Realisasi	-	74,48%	74,48%	120,00%	120,00%	120,00%	TLK

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal						
	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max /
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99,00%	97,54%	AVG

K-Three	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal						
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	-	-	-	-	100%	100%	Max /
Realisasi	-	-	-	-	120%	120%	TLK

K-Wide	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal						
	8c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/
Realisasi	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TLK

**Note : Target 2023 sebesar 12,5% dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)**

K-Three	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif						
	9a-N Indeks Pengawasan Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2023	Pol/KP
Target	-	-	-	-	80	80	Max /
Realisasi	-	-	-	-	93,79	93,79	TLK

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

**Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2023**

Kode	IKU	V/C	Target 2023	Realisasi 2023	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)							
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							112,37%
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	116,56%	14%	33%	116,560%	116,56%

1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	122,00%	14%	33%	152,50%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas		P/M	88,67	89,17	14%	33%	100,56%
	Customer Perspective(20%)							21,84%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							109,22%
2a-CP	Presentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	98%	14%	50%	98,43%	98,43%
2b-CP	Presentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	121,26%	14%	50%	121,26%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)							28,16%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	68%	68,83%	14%	30%	101,22%	101,22%
3b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	P/L	100%	122%	19%	40%	121,54%	120,00%
3c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	P/M	100%	103,33%	14%	30%	103,33%	103,33%

4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,13%	14%	50%	199,64%	120,00%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70%	92,27%	14%	50%	131,81%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							111,11%
5a-CP	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	P/M	90%	100,00%	14%	50%	111,11%	111,11%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							111,20%
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	88,07%	14%	50%	102,41%	102,41%
6b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%

	Learning & Growth Perspective (25%)							29,56%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							115,56%
7a-CP	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	P/M	90%	100,00%	14%	56%	111,11%	111,11%
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							119,12%
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,00%	117,36%	14%	33%	117,360%	117,36%
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120%	14%	33%	120%	120,00%
8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%

9a-N	Indeks Pengawasan Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	70%	96%	14%	50%	138%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>114,67%</b>

Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Banda Aceh, kami sajikan capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Banda Aceh. Adapun Target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	194,001%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%	136,201%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	379,58%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	100%	135,73%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55	4,82
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	71,65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	105,66%

		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	100,00%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	111,98%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,04%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100,00%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,05%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91	96,30
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	91,09%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%
10.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	93,79
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,46
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	97,54%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100,00%

Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				
			2020	2021	2023	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial</b>						
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%
			-	70,61%	71,65%	68,83%	-
		Implementasi evaluasi kinerja berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%
			121,50%	100,00%	111,98%	120%	-
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%
			100,00%	101,32%	105,66%	121%	-
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
			108,72%	127,20%	194%	116%	-
		Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%	100%	100%	100%
			163,46%	121,95%	100%	103%	
<b>2.</b>	<b>Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya</b>						
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%
				36,83%	120,35%	379,58%	98,43%
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	80%	80%
				33,96%	48,84%	49,03%	122,00%

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	25%	25%
			0,27%	0,00%	0,04%	0,1%	-
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00	4,00	4,00	-	-
			4,80	4,81	4,82	-	-
	Persentase kualitas anggaran	95%	95%	95%	100%	95%	
		98,93%	96,61%	97,54%	117%	-	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	86%	80%	
		80,65%	85,86%	91,09%	88%	-	

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dari evaluasi kinerja terhadap IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2023 sebagai berikut:

### Sasaran Strategis I: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Dalam Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 3 IKU terkait Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif dengan rincian:

- a. Persentase realisasi penerimaan negara berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang dicapai KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar Rp16.228.338.892,00 dengan target pada tahun 2023

adalah sebesar Rp14.100.000.000,00 atau 127,202% dari target. Kemudian PNBP Piutang Negara mencapai Rp100.684.011,00 atau 1.184,52%, pencapaian ini patut diapresiasi mengingat target sejumlah Rp8.500.000,00. Selanjutnya, PNBP Lelang mencapai Rp1.959.498.608,00 atau 126,42% dari target Rp1.550.000.000,00. Ketiga pencapaian tersebut menghasilkan realisasi persentase realisasi penerimaan negarai sebesar 116,56% dari target 100%.

b. IKU Persentase produktivitas lelang

Dalam pengukuran IKU Persentase produktivitas lelang ini ada 2 komponen yang dilakukan proporsi pengukuran yaitu proporsi perhitungan frekuensi lelang sebesar 60% jika jumlah frekuensi lelang lebih besar daripada tahun sebelumnya dari jumlah keseluruhan dan proporsi lot laku lelang sebesar 40% berdasarkan rata-rata dari lot laku lelang non eksekusi sukarela sebesar 75%, lot laku lelang noneksekusi wajib sebesar 55%, lot laku lelang eksekusi HT sebesar 5%, dan lot laku lelang eksekusi selain HT sebesar 25%. IKU ini ditargetken sebesar 80% dalam tahun 2023. Pencapaian IKU persentase implementasi digitalisasi pelayanan lelang tahun 2023 diperoleh capaian 122% atau 152,50,11% jika dihitung dengan indeks tanpa batas.

c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publikdalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini ditargetkan sebesar 88,67 dan terealisasi sebesar 89,17 atau tercapai hingga 100,56%

## **Sasaran Strategis II: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Dari sasaran Strategis Pengelolaan Lelang Yang Optimal ini, diukur dari seberapa besar pendapatan pokok lelang yang berasal dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Dari Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh mengusung IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) untuk tahun 2023 dengan total target adalah Rp73.000.000.000,00. Dan tercapai dengan nilai sebesar Rp71.853.085.345,00 yakni sebesar 98,43% dari nilai target. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh.

Selain itu, terdapat IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara, IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2021, yang bertujuan untuk menurunkan outstanding Piutang Negara secara terukur. Nilai Outstanding BKPN KPKNL Banda Aceh per 31-12-2022 adalah Rp37.934.541.821,56 dengan target awal tingkat Penurunan outstanding piutang negara untuk tahun 2023 adalah Rp155.000.000,00 yang kemudian di addendum pada triwulan III menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00. Pencapaian tahun 2023 adalah sebesar Rp2.425.111.117,92 dari Nilai

Outsanding BKPN atau pencapaian realisasi target adalah sebesar 121,26%. Pencapaian ini tidak lepas dari usaha keras KPKNL Banda Aceh terutamanya Seksi Piutang Negara dalam pencapaiannya, pencapaian penyelesaian ini didapat dari Pelunasan Piutang Negara, Penarikan Piutang Negara dan PSBDT.

### **Sasaran Strategis III: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara; 2) penilaian; dan 3) lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*). 3). Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset 5). Aset tertib administrasi, fisik, dan hukum 6). Piutang negara terselesaikan dengan optimal. KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi 4 (empat) IKU yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase Bidang tanah BMN yang Disertipikatkan, Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), dan Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).

#### **a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Terhadap target sebesar 68%, KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan sebanyak 68,83% sehingga indeks nilai capaian sebesar 101,22%.

#### **b. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan**

Pada tahun 2023 output penyelesaian bidang tanah BMN yang disertipikatkan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni

- a. K1: Clean and Clear (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP).

- b. K2: Not Clean but Clear (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertifikat Hak Pakai/Peta Bidang Tanah (PBT).
- c. K3: Clean But Not Clear (Berita Acara Pemeriksaan Data Yuridis Dan/Atau Fisik BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pensertipikatan)
- d. K4: Update dan Validasi Data; untuk bidang tanah sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN, dengan output berupa update data SIMAN dan validasi di Valserah.

KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan target kategori K1 sebanyak 923 bidang atau 2.796,97% dari target 33 bidang yang harus disertipikat. Selanjutnya, menyelesaikan target kategori K2 sebanyak 367 atau 88,22% dari target 367 NUP. Pada kategori K3 berhasil menyelesaikan sebanyak 382 atau 89,25% dari target 428 NUP dan pada kategori K4 berhasil menyelesaikan sebanyak 1.573 atau 87,78% dari target 1.792 NUP. Sehingga, memiliki total realisasi sebanyak 3.245 atau sebesar 121,54% dari target 2.669.

c. Persentase penyelesaian BKPN

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya/ terselesaikannya Piutang Negara. KPKNL Banda Aceh mendapat target IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN Tahun 2023 adalah sebesar 30 BKPN. Dan KPKNL Banda Aceh dapat menyelesaikan sebanyak 31 BKPN dengan target diperoleh pencapaian persentase 103,33%. Adapun program yang diusung DJKN yakni *Crash Program* sangat membantu Penanggung Hutang yang tidak mempunyai kemampuan usaha/finansial karena terkena dampak pandemi covid-19 untuk menyelesaikan utangnya.

**Sasaran Strategis IV: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Pada sasaran strategis ini, terdapat IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Bagi para Penilai Pemerintah di KPKNL Banda Aceh, tentu ini merupakan hal yang wajar, karena nilai yang dihasilkan dari laporan-

laporan yang telah dibuat merupakan gambaran nilai wajar terhadap objek penilaian. Analisa-analisa dan kajian-kajian yang diasumsikan sesuai dengan kondisi pasar/pendapatan/biaya yang ada merupakan faktor yang mendukung tercapainya iku deviasi ketergunaan hasil penilaian ini. Tahun 2023 KPKNL Banda Aceh memperoleh target sebesar 25% dengan realisasi sampai akhir tahun 2023 tercapai 0,13 dengan asumsi 100% nilai yang dihasilkan oleh KPKNL dapat dipergunakan oleh satker yang menghasilkan realisasi sebesar 199,64%. Dengan realisasi semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang disimpulkan oleh para Penilai Pemerintah KPKNL Banda Aceh merupakan dasar dalam persetujuan menghasilkan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Selanjutnya, terdapat IKU Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien yang mengukur dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Sehingga dihitunglah rata-rata penyelesaian penilaian dengan perkalian antara indeks pelaksanaan penilaian per laporan penilaian dan jumlah laporan penilaian yang kemudian dibagi jumlah laporan penilaian. Target dari IKU ini sebanyak 70% dengan capaian 92,27% atau sebesar 131,81% jika dihitung pada indeks tanpa batas.

#### **Sasaran Strategis V: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Dalam Sasaran Stategis ini KPKNL Banda Aceh menghitung IKU Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang dimana akan mengukur seberapa besar pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dengan e-auction dan dengan e-conventional auction. Tentunya harapan semua pelaksanaan telah dengan menggunakan lelang e-auction. Tahun 2023 KPKNL Banda Aceh berhasil melaksanakan IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebesar 100% dari target 90% atau sebesar 111,11%.

#### **Sasaran Strategis VI: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Dalam Sasaran Stategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 IKU terkait Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif dengan rincian:

a. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pegelolaan Barang Milik Negara

Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai saran/rekomendasi/bahan perbaikan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Dan untuk mengetahui kepatuhan satker dalam menindaklanjuti persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh pengelola barang. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi IKU Persentase tindak lanjut persetujuan

pengelolaan aset. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset ini dikukur dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L ditambah Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L dibagi dengan penjumlahan dari Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023 dengan target 86%. Pencapaian target tahun 2023 adalah  $((37+59)/(44+65))=88,07\%$  atau pencapaian 102,41%

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset.

Evaluasi Kinerja Aset merupakan salah satu program unggulan DJKN yang harus kita laksanakan. Selain itu, Evaluasi Kinerja Aset merupakan program dengan sistem berkelanjutan, Dengan berlatar belakang permasalahan pengelolaan aset, DJKN melakukan manajemen portofolio aset dan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pengelolaan BMN secara optimal, DJKN berharap dengan adanya penerapan portofolio aset tahunan, maka akan diperoleh 3 (tiga) manfaat yakni, mengidentifikasi dan mengumumkan K/L yang menggunakan BMN secara kurang optimal; memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan BMN berupa lahan/bidang tanah kosong dan/atau idle; mengidentifikasi tanah dan bangunan pemerintah yang memiliki potensi penggunaan/pemanfaatan alternatif yang lebih baik. IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) ini adalah IKU bagi KPKNL Banda Aceh.

Pada tahun 2023 selain menghitung jumlah evaluasi kinerja aset sebanyak 30 NUP, terdapat perhitungan atas penyampaian rekomendasi sebanyak 7 paket yang keduanya telah terealisasi 38 NUP atas evaluasi aset dan 7 paket penyampaian rekomendasi pada triwulan III. Sehingga terdapat addendum perhitungan IKU dengan menambah target evaluasi kinerja aset 9 NUP dengan total keseluruhan 39 NUP. Target tersebut teralisasi sebesar 49 NUP atau sebesar 121,33% pada akhir tahun.

### **Sasaran Strategis VII: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 2 (dua) IKU yakni, IKU Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah yang memiliki tujuan untuk memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu di wilayah berjalan dengan optimal. Pengukuran IKU ini difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah yaitu: 1) join program penerimaan 2) RCE dan 3) Sinergi UMKM. Dengan target sebesar 90% telah tercapai sebesar 100% atau sebesar 111,11% jika diukur dengan indeks tanpa batas.

Selanjutnya, IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Formula IKU ini capaian utama ditambah dengan capaian tambahan. KPKNL Banda Aceh mencapai target maksimalnya yakni 120%.

### **Sasaran Strategis VIII: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

Salah satu pengukuran anggaran berdasarkan output yang dicapai maka salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana/anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sasaran strategis ini IKU yang didapat KPKNL adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga dapat diukur tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 117,36% dari target sebesar 100%.

Selain itu, terdapat IKU persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). IKU ini berhasil dicapai hingga 120% dari target 100%.

Selanjutnya merupakan IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN. PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidang Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pengadaan).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%. Rata-rata realisasi dari deviasi data PNBPN Fungsional DJKN sebesar 0,00%, sehingga, memperoleh nilai 200%.

### **Sasaran Strategis IX: Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Dalam rangka memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, yaitu proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. IKU ini berhasil terealisasi sebesar 96% dari target 70% atau sebesar 138%.

### **3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target**

Secara umum, pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 berstatus hijau, dengan hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,27% dari nilai maksimal 120%. Pencapaian yang sangat luar biasa adalah pencapaian dari seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh.

Terhadap keberhasilan penerimaan PNBPN, seluruhnya telah mencapai target yang Keberhasilan penerimaan PNBPN Piutang Negara yang mampu mencapai Rp100.684.011,00 dari target sebesar Rp8.500.00,00. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi dan keadaan, dengan posisi keadaan yang serba sulit namun dengan adanya program pemerintah *Crash Program* yakni optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara, KPKNL Banda Aceh bersama penyerah piutang juga memanfaatkan untuk penyelesaian-penyelesaian pengurusan Piutang Negara.

Penilai juga menuntaskan pekerjaannya dengan baik ditandai dengan realisasi IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian yang hanya sebanyak 0,04% dimana, realisasi yang semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang disimpulkan oleh para Penilai dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Banda Aceh merupakan dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang terus berkoordinasi dengan kantor petanahan juga telah berhasil menoreh prestasi dalam melakukan program sertifikasi BMN seperti sertifikasi terbanyak di tahun 2019 dan penyelesaian sertifikasi tercepat di tahun 2020, dan pada tahun 2023 KPKNL Banda Aceh berhasil mengerjakan 5.641 bidang tanah dengan target kategori yang berbeda-beda, target tersebut termasuk tiga besar dengan jumlah target terbanyak di DJKN.

Sementara, IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang belum berstatus hijau namun hal tersebut juga perlu diapresiasi karena mengingat penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, yang dalam implementasinya menjadikan badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syari'ah. Pada tahun 2021 Bank Konvensional harus sudah menutup kantor operasionalnya di banda Aceh dan berubah ke Bank Syariah. Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup menantang dalam rangka penerapan aturan tersebut. Perubahan ini cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Banda Aceh, karena perubahan perbankan konvensional ke bank Syariah akan berpengaruh terhadap kuantitas permohonan lelang.

Seluruh pencapaian dan tantangan tersebut patut disyukuri karena walau ditengah banyaknya halangan, namun sebagian besar target mampu dicapai. Semua ini dikarenakan upaya-upaya maksimal yang terus dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh diantaranya adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk jenis lelang yang belum optimal (eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN dan non eksekusi sukarela).

#### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud bisa berupa Dana maupun Manusia serta Peralatan dan Mesin. Pada tahun 2023, jumlah Sumber Daya Manusia lebih sedikit dari kebutuhan sesuai dengan analisis beban kerja, kendati demikian Sumber Daya Manusia yang ada telah berhasil menyelesaikan seluruh target dengan maksimal.

Sumber Daya Manusia juga turut serta mengembangkan inovasi dan dapat memaksimalkan teknologi yang ada dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan tugas, sehingga Sumber Daya Dana juga mengalami penghematan yang cukup signifikan.

#### **5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan**

Berbagai inovasi dirancang oleh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam rangka mempercepat proses bisnis yang ada sehingga menunjang keberhasilan atas pencapaian kinerja, inovasi tersebut yaitu:

a. ANTUM (Aplikasi Pelayanan Tamu Umum)

Aplikasi sistem antrian elektronik yang memungkinkan pengunjung mendapatkan nomor antrian pelayanan secara online. Aplikasi ini akan memuat data informasi pengunjung yang memuat identitas dan tujuan kedatangan yang dapat dipakai oleh petugas APT untuk memanggil petugas KPKNL Banda Aceh yang berkaitan dengan tujuan pengunjung.

b. MONIKEN (Monitoring Intergrasi Kekayaan Negara)

Ide baru ini bermanfaat untuk pemantauan progres pengelolaan kekayaan negara dan juga sebagai pengelompokan data arsip secara online yang dapat menunjukkan data secara realtime sesuai informasi yang diinput, dengan adanya monitoring pengelolaan kekayaan negara ini setiap pegawai ataupun kepala seksi pada seksi pengelolaan kekayaan negara juga dapat mengetahui identitas setiap berkas yang telah selesai dikerjakan, pengelompokan berkas jika suatu saat dibutuhkan kembali, dan beberapa data lainnya seperti update capaian kinerja, pengadministrasian nomor laporan pertanggung jawaban dan beberapa hal lainnya yang tentunya berdampak pada efisiensi kinerja pada seksi pengelolaan kekayaan negara.

c. Tapak Tuan (Tampilan Teraktual Status Laporan Penugasan dan Keuangan)

Inovasi bentuk pelayanan administrasi dan keuangan merupakan salah satu simplifikasi proses pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam bentuk digital. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan aktual terkait status administrasi dan proses pembayaran perjalanan dinas sehingga mampu mempercepat proses pembayaran serta penatausahaan yang optimal pada setiap pelaksanaan tugas.

d. Kedai Lelang UMKM

Kedai lelang UMKM pada tahun ini dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pelaksanaan lelang yang melibatkan pelaku UMKM dan juga beberapa komunitas UMKM yang ada di Banda Aceh dengan target pasar yakni seluruh masyarakat Indonesia dan teknik publikasi melalui aplikasi lelang juga sosial media KPKNL Banda Aceh. Kegiatan ini selain meningkatkan IKU produktivitas risalah lelang, pokok lelang, dan PNBP Lelang. Namun hal yang sangat istimewa dari kegiatan ini adalah dapat memperkenalkan kebudayaan dan karya seni rakyat Aceh pada *platform* lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, memperluas jejaring penjualan kreativitas rakyat Aceh yang telah memiliki ide-ide kreatif, inovatif serta solutif

e. *Crash Program*

Program ini merupakan program keringanan utang untuk meringankan utang para debitur. Program ini menawarkan keringanan seluruh utang bunga, denda, dan ongkos (BDO), ditambah keringanan utang pokok yg persentasenya bervariasi sesuai kondisi.

## 6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi

Pada tahun 2023 terdapat rencana aksi sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi/penggalian potensi dengan unit kerja/penyerah piutang negara dan debitur
- b. Melakukan koordinasi rutin dan pengawasan langsung pada satuan kerja
- c. Melakukan koordinasi bersama internal kemenkeu mengenai lelang.go.id.
- d. Melakukan koordinasi rutin dan pengawasan pada stakeholder terkait.
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait pengosongan objek lelang sebelum dilaksanakan lelang.
- f. Memberikan pelayanan informasi dan pemantauan progress rutin.
- g. Aktif mensosialisasikan kepada para penyerah piutang dan para pegawai/staf di lingkungan kantor.
- h. Melakukan koordinasi rutin dan pemantauan tindaklanjut persetujuan pengelolaan BMN.
- i. Monitoring dan evaluasi peningkatan *hard competency*.
- j. Koordinasi kepada seluruh seksi secara berkala.
- k. Melakukan koordinasi terkait potensi PNBP penilaian dan lelang terhadap barang rampasan *illegal fishing* berupa Kapal 350 GT.

Seluruhnya telah dilaksanakan pada tahun 2023

## 7. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 akan mendukung rencana aksi terdahulu dan menganalisis kembali terhadap tantangan atas capaian yang baru di tahun ini, untuk itu KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja, yaitu:

- a. Rencana aksi koordinasi dari awal tahun melakukan optimalisasi terhadap target SBSK tahun 2023 yang kesesuaiannya di bawah 75% (sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan SBSK tahun 2023), sehingga dilakukan dengan satuan kerja terkait. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker, dalam pencapaian target sertifikasi tahun 2023 sebanyak 4.377 bidang.
- b. Rencana aksi koordinasi dan sosialisasi juga akan digencarkan dengan pihak perbankan, diwilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Selain itu koordinasi dengan satker-satker dan pihak-pihak lainnya seperti UMKM, pegadaian, BUMN, dan pemerintah daerah di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh terkait lelang-lelang yang berpotensi untuk digali, jenis lelang yang akan dioptimalkan di tahun 2024 adalah eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN/BMD, dan non eksekusi sukarela UMKM, BUMN, dan pegadaian.
- c. Selain itu, tentunya juga melanjutkan rencana aksi tahun sebelumnya yang telah dianalisis dengan baik dan disesuaikan terhadap setiap indikator kinerja utama dan yang ada pada KPKNL Banda Aceh.

## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator dari persentase kualitas pelaksanaan anggaran. KPKNL Banda Aceh dengan sinergi yang solid berkomitmen untuk mencapai target realisasi anggaran sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Hal ini membuahkan hasil yang gemilang yaitu KPKNL Banda Aceh meraih prestasi dengan nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna 100 pada triwulan I, II, dan III pada tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A I Banda Aceh dan Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Realisasi anggaran KPKNL Banda Aceh dengan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2023 adalah sebesar 117,36% dari target 100%. Optimalisasi penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal ditengah perubahan target yang menjadi proses bisnis utama DJKN, dengan tujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Strategis. Berbagai penyesuaian Pagu anggaran juga dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh untuk dapat mewujudkan anggaran yang menunjang kinerja organisasi.

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-015.09.2.537827/2023 tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp2.104.118.000 dengan perubahan rencana penarikan dana dan perubahan pagu anggaran antar rincian output, revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp1.899.358.978 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 90,27%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 90,27% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.981.772.000 dengan realisasi sebesar Rp1.777.036.978 atau sebesar 89,67%.

2. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat belanja pegawai dikarenakan sentralisasi pengelolaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Gaji Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 28 Februari 2020. Sehingga, sejak tahun 2021 belanja pegawai disentralisasikan ke kantor pusat.

3. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp122.346.000 dengan realisasi sebesar Rp122.322.000 atau sebesar 99,98%.

**Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2023**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>100,00</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan I 2023</b>			<b>100,00</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>95,50</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan I 2023</b>			<b>114,60</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan I 2023</b>			<b>120,00%</b>

**Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2023**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>100,00</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan II 2023</b>			<b>100,00</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>95,50</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan II 2023</b>			<b>114,60</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan II 2023</b>			<b>120,00%</b>

**Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2023**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 100%)</b>			<b>100,00</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 0%)</b>			
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan III 2023</b>			<b>100,00</b>
<b>Target IKU IKKPA</b>			<b>95,50</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan III 2023</b>			<b>114,60</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA Triwulan III 2023</b>			<b>120,00%</b>

**Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2023**

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>100,00</b>
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>B) Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>95,34</b>
1. Capaian Output	100,00	43,50%	43,50
2. Efisiensi	87,52	28,60%	25,03
3. Konsistensi RPD	99,19	18,20%	18,05
4. Penyerapan Anggaran	90,27	9,70%	8,76
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV</b>			<b>97,67</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>117,36</b>

**Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023**

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Ban Sos	LainLain	
1	537827   KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,981,772,000 1,777,036,978 (89.67%)	122,346,000 122,322,000 (99.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,104,118,000 1,899,358,978 (90.27%)
		SISA	0	204,735,022	24,000	0	0	0	0	0	204,759,022
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,981,772,000 1,777,036,978 (89.67%)	122,346,000 122,322,000 (99.98%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,104,118,000 1,899,358,978 (90.27%)
		SISA	0	204,735,022	24,000	0	0	0	0	0	204,759,022

Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2023

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Ban Sos	LainLain		Transfer
1	4700   Legislasi dan Litigasi	PAGU	0	12.968.000	0	0	0	0	0	0	0	12.968.000
		REALISASI	0.00%	12.496.000 (96.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.496.000 (96.36%)
		SISA	0	472.000	0	0	0	0	0	0	0	472.000
2	4701   Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU	0	1.413.778.000	122.346.000	0	0	0	0	0	0	1.536.124.000
		REALISASI	0.00%	1.257.918.073 (88.98%)	122.322.000 (99.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.380.240.073 (89.85%)
		SISA	0	155.859.927	24.000	0	0	0	0	0	0	155.883.927
3	4702   Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU	0	12.380.000	0	0	0	0	0	0	0	12.380.000
		REALISASI	0.00%	9.562.000 (77.24%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.562.000 (77.24%)
		SISA	0	2.818.000	0	0	0	0	0	0	0	2.818.000
4	4704   Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU	0	6.678.000	0	0	0	0	0	0	0	6.678.000
		REALISASI	0.00%	6.437.000 (96.39%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.437.000 (96.39%)
		SISA	0	241.000	0	0	0	0	0	0	0	241.000
5	4796   Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU	0	16.204.000	0	0	0	0	0	0	0	16.204.000
		REALISASI	0.00%	13.012.000 (80.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.012.000 (80.30%)
		SISA	0	3.192.000	0	0	0	0	0	0	0	3.192.000
6	4798   Pengelolaan Aset	PAGU	0	519.784.000	0	0	0	0	0	0	0	519.784.000
		REALISASI	0.00%	477.811.905 (91.89%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	477.811.905 (91.89%)
		SISA	0	42.152.095	0	0	0	0	0	0	0	42.152.095
GRAND TOTAL		PAGU	0	1.981.772.000	122.346.000	0	0	0	0	0	0	2.104.118.000
		REALISASI	(0.00%)	1.777.036.978 (89.67%)	122.322.000 (99.98%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1.899.358.978 (90.27%)
		SISA	0	204.735.022	24.000	0	0	0	0	0	0	204.759.022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023 dengan sedikit penurunan jumlah NKO dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa tantangan namun dapat dilalui dan diselesaikan dengan sangat baik. Seluruh target atas 9 Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Banda Aceh Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik, sebagian besar melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 113,27% dari nilai maksimal 120%.

Sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus menerus menuju kesempurnaan. Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Desember Tahun 2023 adalah Rp1.899.358.978 dari anggaran sebesar Rp Rp2.104.118.000 atau sebesar 90,27%

#### **FAKTOR PENDUKUNG**

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para stakeholder;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu dari seluruh pegawai.

#### **KENDALA**

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Banda Aceh dapat berjalan dengan mudah. Secara global kendala-kendala yang akan dihadapi adalah:

1. Pemberlakuan SKPT online yang pada prakteknya dilapangan masih belum seragam di setiap Kantor Pertanahan;
2. Masih besarnya saldo aset eks BRR dan lokasinya tersebar;
3. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru, menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
4. Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM yang mengelola BMN ditingkat satuan kerja;
5. Terdapat banyak satuan kerja dan stakeholder yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
6. Dampak dari reorganisasi pada DJKN yang menggantikan seksi pelayanan lelang dan pelayanan penilaian menjadi jabatan fungsional terdapat beberapa adaptasi kebutuhan sumber daya manusia pada pelayanan lelang dan penilaian;
7. Terhadap lelang eksekusi hak tanggungan masih dalam proses adaptasi dengan penerapan Qanun Aceh terkait Lembaga Keuangan Syari'ah yang memberikan dampak signifikan terhadap kuantitas permohonan lelang. Selain itu, belum terdapat variasi pembiayaan untuk pembelian lelang dan timbulnya beberapa perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik non TGR ataupun TGR yang mengakibatkan penurunan peminat terhadap objek lelang.
8. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah juga penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan;
9. Tantangan dalam pengurusan piutang negara seringkali Debitur tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitur tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN);
10. Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas. Dengan terbatasnya jumlah Pelelang dan Penilai, penetapan jadwal lelang dan penilaian harus benar-benar memerhatikan waktu pelaksanaan, mengingat lama perjalanan dinas luar kota dapat memakan waktu yang panjang.

## **B. Saran**

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Banda Aceh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Banda Aceh agar *output* dan *outcome*

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, diharapkan KPKNL Banda Aceh dapat lebih fokus dalam menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Banda Aceh adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerjasama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan professional kepada stakeholder dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Terus melanjutkan proses penyelesaian pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias;
6. Meningkatkan penggalian potensi lelang, lelang pegadaian dan lelang sukarela;
7. Penambahan jabatan fungsional pelelang dan penilai sehingga pelayanan dapat tersampaikan dengan prima;
8. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi;
9. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
12. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
13. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
14. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Banda Aceh secara berkala;
15. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
16. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

17. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara, serta sertifikasi BMN.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tahun anggaran 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh. Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan stakeholder serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-1/WKN.01/2023 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

### Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BANDA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
		3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90
		5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7c-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		8c-N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP Indeks Integritas Organisasi	82,89

Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 518.121.000
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 16.204.000
3. Pengelolaan Aset	Rp 501.917.000
4. Program Dukungan Manajemen	Rp 1.568.150.000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp 12.968.000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.536.124.000
7. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 12.380.000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 6.678.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syukriah HG

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BANDA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	55	55	68	68
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57	67	67	77	77	90	90
5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50		50	86	86	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif								
7a-CP	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20	45	45	70	70	90	90	
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100	
7c-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80	
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100	
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas						10	10	
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif								
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi						82,89	82,89	

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Banda Aceh,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Kegiatan Monitoring			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Istina Setya Lestari	NAMA	Syukriah HG	
NIP	197512131995031001	NIP	197004191996032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan



2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipkatkan	100	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100	Proses Bisnis



		(BKPN)		
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	94	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis



14.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10	Penguatan Internal atau Anggaran



20.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Integritas Organisasi	82,89	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				
1.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Istina Setya Lestari

197512131995031001

Ditandatangani secara elektronik

Syukriah HG

197004191996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	32 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	0	50	50	55	55	68	68
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100



8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57	67	67	77	77	90	90
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50			86	86
14	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20	45	45	70	70	90	90
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
16	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
18	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
19	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas						10	10
20	Indeks Integritas Organisasi						82,89	82,89

#### KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai, maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai, maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan*



yang berlaku.

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Istina Setya Lestari

Syukriah HG

197512131995031001

197004191996032001

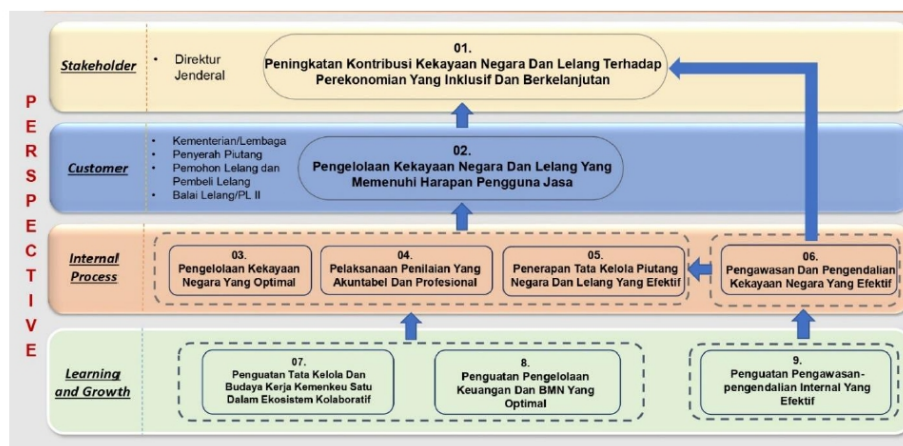




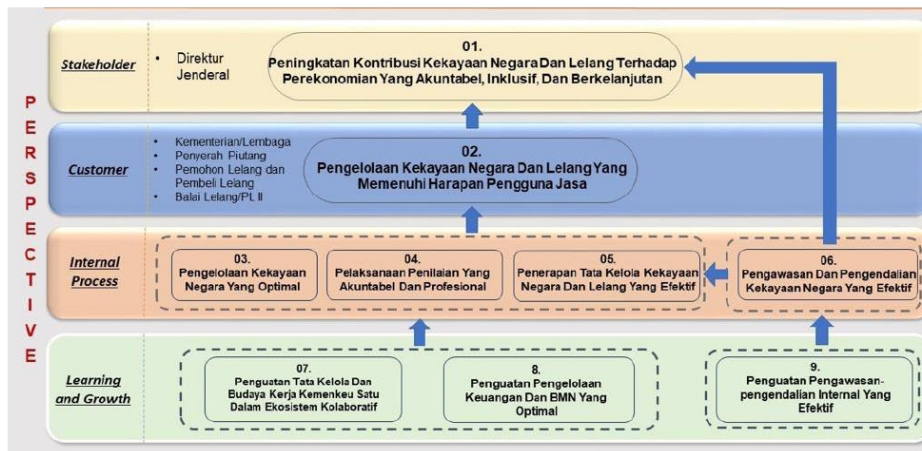
## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK- 1A/WKN.01/2023

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1/WKN/2023 tanggal 01 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### Peta Strategis Sebelum Adendum



### Peta Strategis Setelah Adendum



### A. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder perspective</i>		<i>Stakeholder perspective</i>	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
<i>Internal process perspective</i>		<i>Internal process perspective</i>	
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

### B. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Penambahan IKU Baru

Sebelum		Target				Menjadi		Target			
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Q3	s.d Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
						1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal process perspective</i>						<i>Internal process perspective</i>					
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	75%	100%	5c-CP	Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	75%	100%
<i>Internal process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
5b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif					9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif				
						9a-N	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	-	-	70	70

### C. Penghapusan IKU dan Sub-IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	Indeks Integritas	IKU dihapus dari PK KPKNL Banda Aceh karena perubahan menjadi Indeks Integritas
7c-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	IKU dihapus dari PK KPKNL Banda Aceh karena perubahan menjadi Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Banda Aceh karena IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas UIC hanya pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

### D. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum		Target				Menjadi		Target			
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Q3	S.d.Q3	Q4	Y	Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Q3	S.d.Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Raw Data Sebelum: 155.000.000				2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Raw Data Adendum: 1.600.000.000			
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum KK ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Banda Aceh, 27 September 2023

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari

## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh pada tanggal Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Integritas Organisasi	82,89	Penguatan Internal atau Anggaran

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran

9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh)	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	Penguatan Internal atau Anggaran
---	---	--	----	----------------------------------

#### B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

##### Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum					Menjadi						
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	6	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%	7	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%

8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	70%	70%	70%	10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	70%	70%	70%
11	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	77%	77%	90%	90%	11	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	77%	77%	90%	90%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%	13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%
14	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%	14	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	70%	70%	90%	90%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%
16	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%
18	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	18	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
19	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	10%	10%	19	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	-	-	70	70
20	Indeks Integritas Organisasi	-	-	82,89	82,89						

Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Banda Aceh, 27 September 2023

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari

